

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat

Jalan Pemuda No. 1, Semarang 50173 0243545421

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak

Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotokopi Neraca
3. Fotokopi Laporan Sisa Hasil Usaha (Laba Rugi)
4. Fotokopi Laporan Arus Kas dan Bank
5. Fotokopy Keputusan Menteri Keuangan
6. List sertifikat/bilyet/deposito, tabungan, SBI, SBIS
7. Fotokopi Laporan Investasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat

Jalan Pemuda No. 1, Semarang 50173 0243545421

www.pajak.go.id

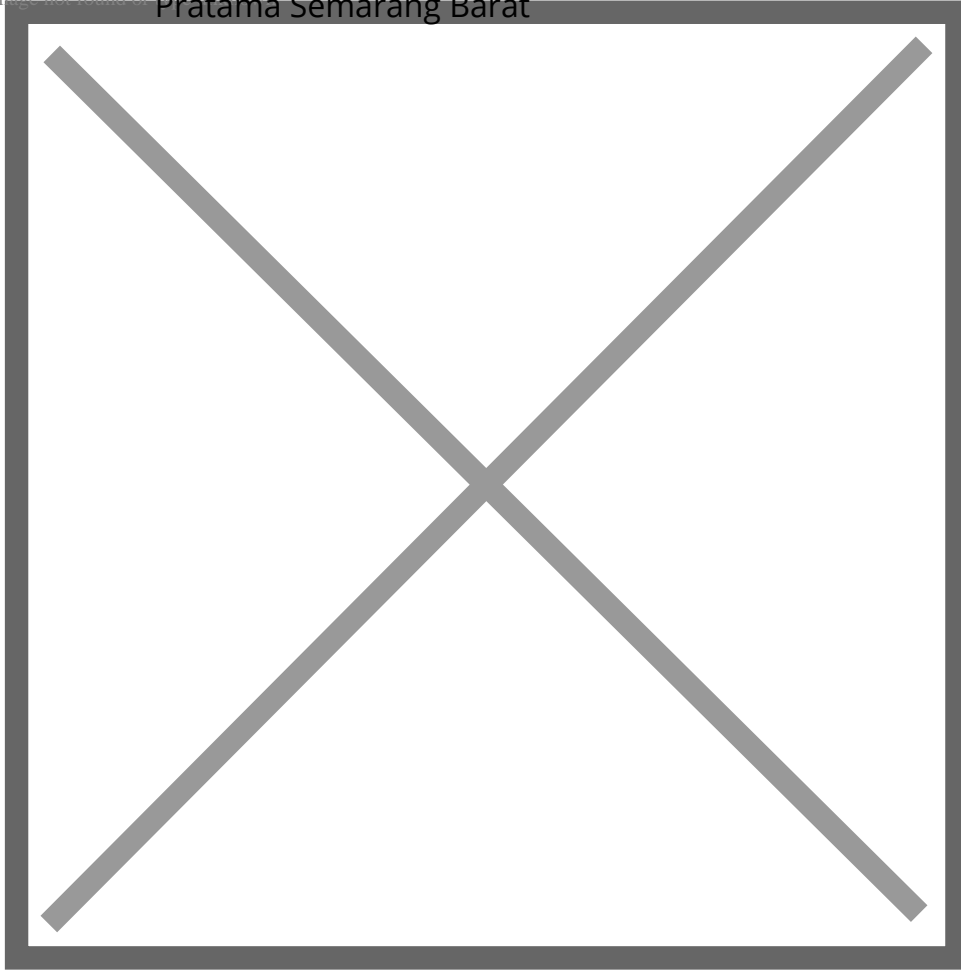


Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak

Image not found or image broken

Pratama Semarang Barat



1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar melalui Tempat Pelayanan Terpadu atau dikirimkan ke alamat KPP melalui Pos/Jasa Ekspedisi lainnya

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya atas jasa pelayanan

Produk Pelayanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat

Jalan Pemuda No. 1, Semarang 50173 0243545421

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak

1. Surat Keterangan Bebas (SKB) Pratama Semarang Barat

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui: 1. Telepon: 1500200 2. Faksimile: (021) 5251245 3. Email: pengaduan@pajak.go.id 4. Twitter: @kring_pajak 5. Website: pengaduan.pajak.go.id 6. Chat Pajak: www.pajak.go.id 7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya